

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
PROVINSI JAWA BARAT  
Nomor : 1299 /102.1/Kep/OT/2000\*

Pemberian izin kepada Yayasan Abdi Negara di Tangerang untuk mendirikan SMK/STM KORPRI di Jl. Raya Balaraja Kec. Balaraja Tangerang mulai tahun pelajaran 1999/2000.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
PROVINSI JAWA BARAT

baca : Surat Permohonan dari Yayasan Abdi Negara di Tangerang Nomor 125-30/YAN-KORPRI/III/99 tanggal 31 Maret 1999.

imbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;  
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Abdi Negara Tangerang telah mengusahakan didirikannya SMK/STM KORPRI;  
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;  
d. bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk membangun kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di Lingkungan Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat tentang pemberian izin kepada Yayasan Abdi Negara di Tangerang untuk mendirikan SMK/STM KORPRI di Jl. Raya Balaraja Kec. Balaraja Tangerang mulai tahun pelajaran 1999/2000.

gingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;  
2. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;  
b. Peraturan Pemerintah Nomor 29/1990;  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :  
a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982;  
b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982;  
c. Nomor 0173/0/1983 tanggal 14 Maret 1983;  
d. Nomor 0255/0/1983 tanggal 20 Mei 1983;  
e. Nomor 0304/0/1984 tanggal 13 Juli 1984;  
f. Nomor 0363/0/1988 tanggal 20 Juli 1988;  
g. Nomor 0364/0/1988 tanggal 20 Juli 1988;  
h. Nomor 223/MPK/A2/Kp/1998 tanggal 29 Desember 1998;  
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :  
a. Nomor 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983;  
b. Nomor 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983;  
c. Nomor 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983;

gingat : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 20 April 1986 Nomor 0118/C/1/1980;  
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/102/Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1995.

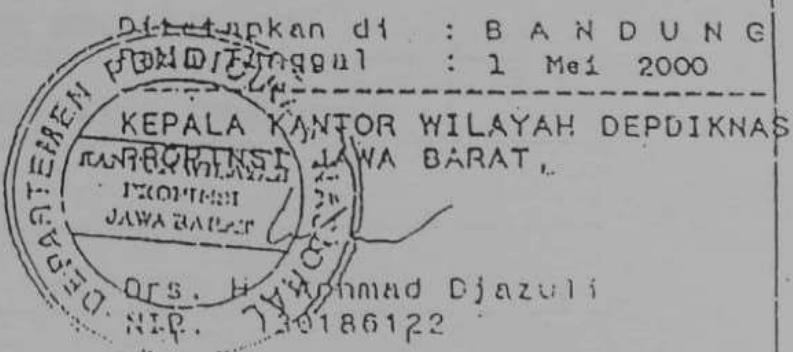
Memperhatikan.....

- mpernatikan: 1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat Nomor 081/I02.8h/MN/2000 tanggal 7 Maret 1999;  
2. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kab. Tangerang Nomor 002/I02.4/OT/1999 tanggal 12 Januari 1999;  
3. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 421.4/207-Sosial tanggal 30 Januari 1999.

mpernatikan  
1a : Akta Notaris Ny. Nanny Wahyudi, SH Nomor 10 tanggal 12 Mei 1990 tentang Pendirian/Pungesahan Berbadan Hukum Yayasan Abdi Negara di Tangerang.

#### MEMUTUSKAN

- ENETAPKAN : Memberi izin kepada Yayasan Abdi Negara di Tangerang untuk mendirikan SMK/STM KORPRI di Jl. Raya Balaraja Kec. Balaraja Tangerang mulai tahun pelajaran 1999/2000.
- ertama : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukau daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Bidang Dikmenjur Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat.
- edua : Menugaskan Kepada Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada pasal pertama.
- etiga : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan segerlunya.
- Kelima :



#### Tembusan:

1. Menteri Diknas di Jakarta;
2. Irjen Depdiknas di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
4. Direktur Dikmenjur Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
5. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
6. Kormin Kanwil Depdiknas Prop. Jabar;
7. Ka. Bagren Kanwil Depdiknas Prop. Jabar;
8. Ka. Bid. Dikmenjur Kanwil Depdiknas Prop. Jabar;
9. Bupati KDH TK. II Tangerang;
10. Ka. Kandepdiknas Kabupaten Tangerang